



TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK



(031)3981990



pariwisata.gresikkab.go.id



[@gresiktourism.official](https://www.instagram.com/gresiktourism.official)



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 127, Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61121
Telepon : (031) 3981990, Faksimile : (031) 3981990
Laman : disparekraftbudpora.gresikkab.go.id, Pos-el : disparekraftbudpora.gresik@gmail.com

**PERATURAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 913 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025 - 2029**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

Mengingat. : .

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan ekonomi Keratif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
DISPAREKRAFBUDPORA

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU
STRATEGIS OPD

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 18 September 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GRESIK



drg. SAIFUDIN GHOZALI

Pembina Utama Muda

NIP. 19751123 200604 1 012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan makro Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2025-2029.

Maksud dari pada penyusunan buku Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025-2029 dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik serta pedoman untuk pembuatan Petunjuk Teknis kegiatan secara detil oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian kebijakan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dokumen Renstra ini belum merupakan dokumen yang sempurna, masih sangat terbatas dan memiliki banyak kekurangan baik dari segi substansinya maupun sistematika penyajiannya, sehingga kedepannya masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan, review maupun penyempurnaan kembali.

Gresik, 18 September 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GRESIK**



dr. SAIFUDIN GHOZALI

Pembina Utama Muda

NIP.19751123 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.....	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.....	32
2.1.5. Mitra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam Pemberian Pelayanan	32
2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.1.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
2.1.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	42
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.2.2. Isu Strategis.....	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS	
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN	
OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK.....	49

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029	49
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	52
3.3 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	58
4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan	83
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107
4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	111
4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	115
4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	119
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.....	125
4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	127
BAB V PENUTUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai SKPD	17
Tabel 2.2	Rincian Perlengkapan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	18
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	19
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	31
Tabel 2.5	Tantangan dan Peluang yang dihadapi beserta Rekomendasi	33
Tabel 2.6	Misi, Tujuan, Sasaran Dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 terkait dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	40
Tabel 2.7	Permasalahan & Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	44
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	50
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	52
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	55
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik	67
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	84

Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	108
Tabel 4.4	Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	112
Tabel 4.5	Sub Kegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	116
Tabel 4.6	Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik	120
Tabel 4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	126
Tabel 4.8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan 5 (lima) tahunan Kepala Daerah.

Untuk mendukung pencapaian misi bupati yang ditransformasikan ke dalam misi pembangunan daerah dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, maka diperlukan penyusunan strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran sampai akhir masa jabatan dimaksudkan sebagai acuan untuk penilaian dan landasan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin meningkat dalam hal efisiensi, efektifitas, transparansi, produktifitas dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029 penyusunan indikator dan target kinerja dalam mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih Tahun 2025-2029 yaitu “Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan sebagai penyusunan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran awal mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA DISPAREKRAFBUDPORA Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan urgensi penyusunan RENSTRA sebagai pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, guna mendukung pembangunan Kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan regulasi yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RENSTRA, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tujuan utama penyusunan RENSTRA, yakni sebagai acuan bagi DISPAREKRAFBUDPORA dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta memastikan kesinambungan program yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kab. Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan struktur dan isi dokumen RENSTRA, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis yang dimiliki oleh DISPAREKRAFBUDPORA dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memberikan gambaran mengenai tugas, fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh DISPAREKRAFBUDPORA dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

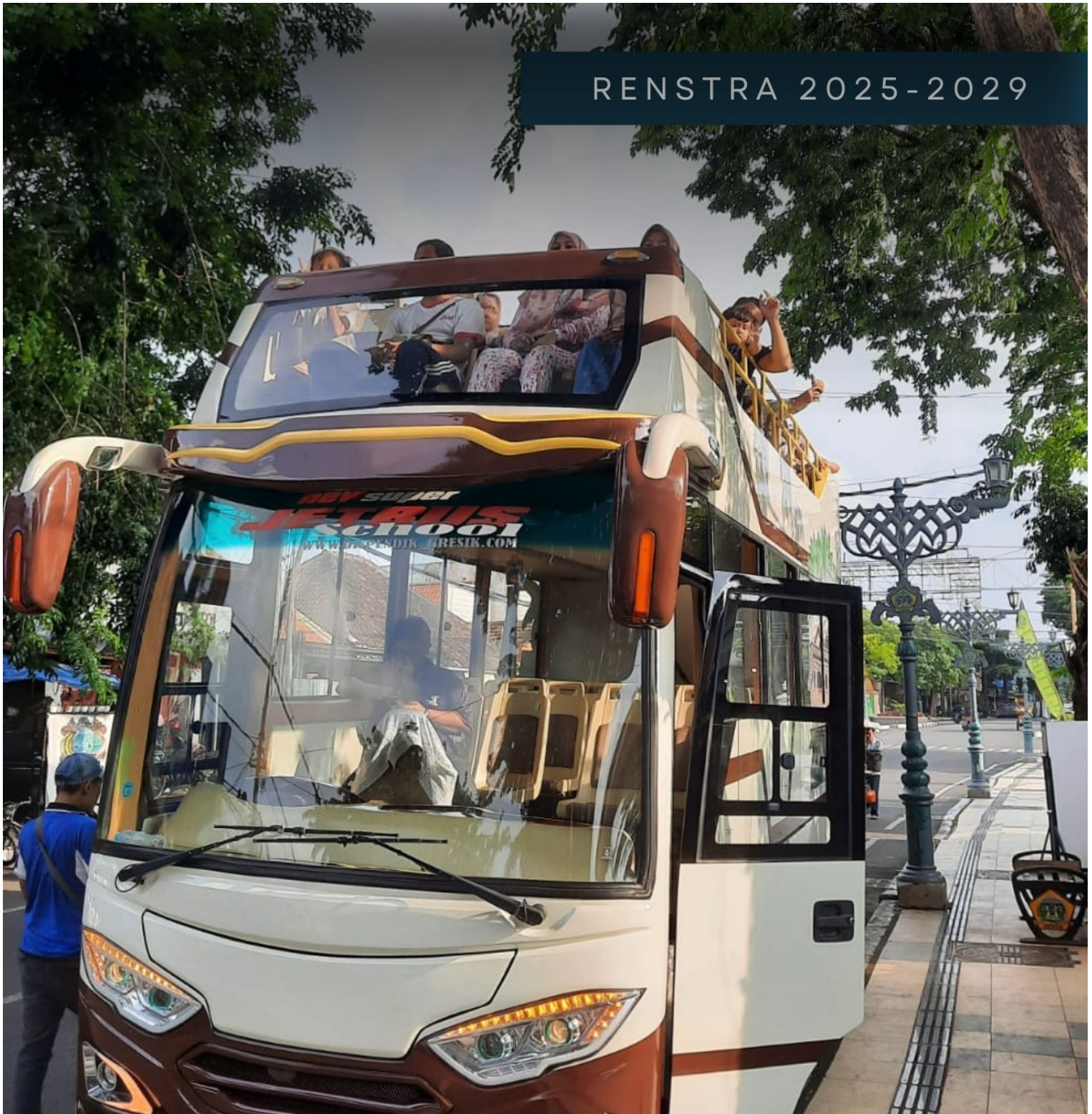
Menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISPAREKRAFBUDPORA, telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Timur dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merinci tujuan strategis yang ingin dicapai serta sasaran utama dan arah kebijakan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gresik selama periode 2025-2029.

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
 - 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Pada bagian ini menguraikan tentang strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
 - 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Pada Bagian ini menguraikan tentang arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Pada Bagian ini berisi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Pada Bagian ini berisi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
 - 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Pada Bagian ini berisi Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.4. Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Pada Bagian ini berisi Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

- 4.5. Sub Kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Pada Bagian ini berisi Sub Kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029
- 4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
Pada Bagian ini berisi Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD
Pada Bagian ini berisi Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD
- 4.8. Target Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD
Pada Bagian ini berisi Target Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD
- BAB V PENUTUP**
Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari dokumen RENSTRA, serta rekomendasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kebijakan DISPAREKRAFBUDPORA Kab. Gresik.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan , Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik mulai di bentuk pada Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan , Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik mempunyai fungsi :

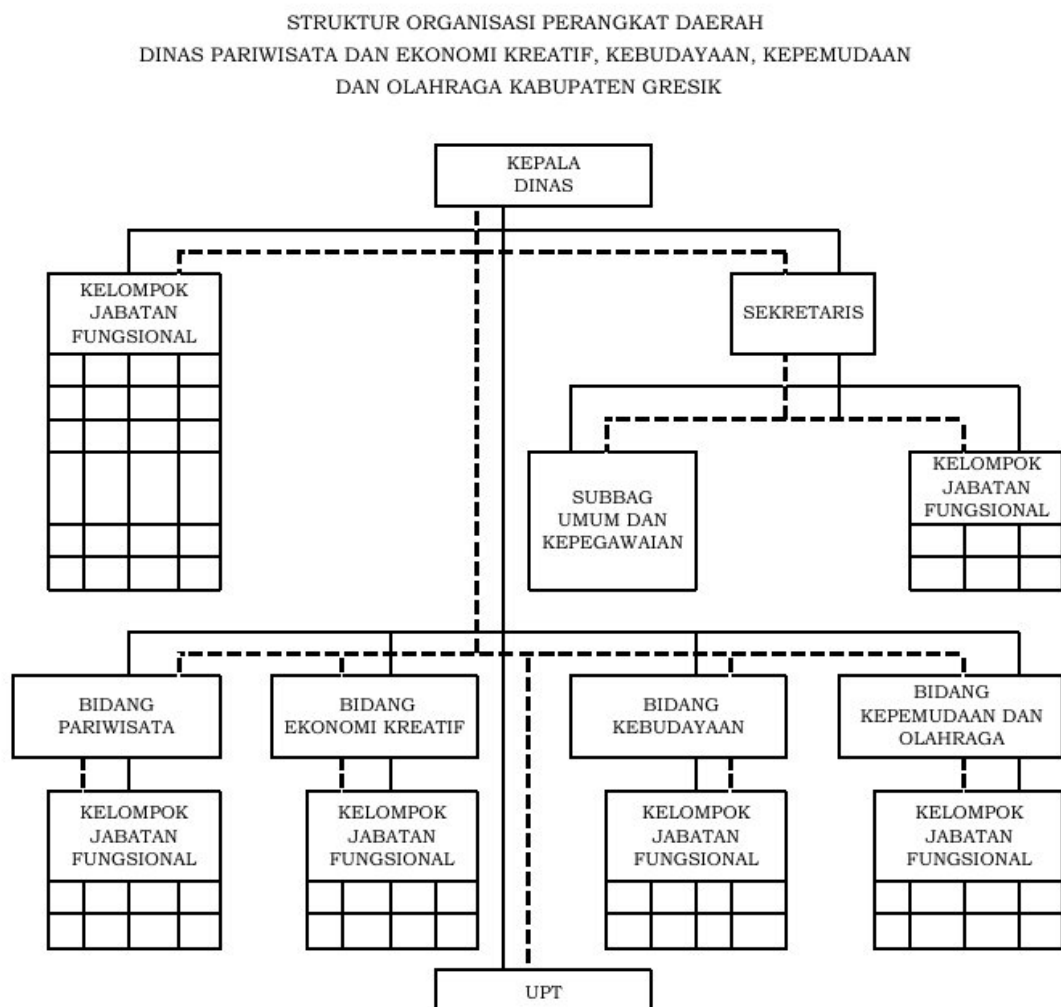
- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi dibidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
- d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga ;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelayanan yang Diberikan untuk Mencapai Tugas Pokok dan Fungsi :

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik memberikan beberapa pelayanan, yaitu :

- a) Seketariat
- b) Bidang Pariwisata
- c) Bidang Ekonomi Kreatif
- d) Bidang Kebudayaan
- e) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Sedangkan untuk Tugas



Unsur-unsur Dinas meliputi:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga; - 7 –
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
- d. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi kepegawaian dan kearsipan; perkantoran, c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang pariwisata.

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas

dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang Ekonomi Kreatif.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi di bidang Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Dalam rangka mencapai target kinerja Perangkat Daerah maka dibutuhkan Sumber Daya sebagai pendukung kinerja. Sumber Daya dimaksud antara lain sumber daya manusia (SDM) dan Sumber Daya Aset. Komposisi SDM dan Sumber daya Aset Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dapat diketahui melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai SKPD

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebanyak 146 orang.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II b	1	
2	Eselon III a	1	
3	Eselon III b	4	
4	Eselon IV a	1	
5	Eselon IV b	2	
6	Pelaksana	24	
7	Fungsional	10	
8	Staf	103	
	JUMLAH	146	

No.	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD	
1	IV c			1							1
2	IV b		1								1
3	IV a		4								4
4	III d			8							8
5	III c			3							3
6	III b			5							5
7	III a			16							16
8	II d				1			2			3
9	II c				1			1			2
Jumlah ASN											
13	THL/Non ASN			36				67			103

Jumlah ASN	+	-	5	67	2	-	-	70	-	-	146
Non ASN											

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

Tabel 2.2
Rincian Perlengkapan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	64	Baik
2.	Laptop	23	Baik
3.	Printer	88	Baik
4.	Proyektor	4	Baik
5.	Kamera	13	Baik
6.	Handycame	6	Baik
7.	Kendaraan Roda 4	9	Baik
8.	Kendaraan Roda 2	10	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam penyusunan Rencana Strategis ke depan maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya sebagai bahan review penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah kedepan. Review capaian indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah periode sebelumnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Gresik

N O	INDIKATOR	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	S P M	BASE LINE	TARGET PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -				REALISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				Rasio			
								2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10		11	12	13		14	15	16
1.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	√	√		√			2-3%	2 - 3 %	2 - 4 %	3 - 5 %	3,48%	96,25%	4,01%	5%	139,20%	3.208,33%	133,67%	125%
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA IK : 1. Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 2. Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata 3. Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan 4. Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan			√				1. 25% 2. 100% 3. 5%	1. 25% 2. 100% 3. 5% 4. 100%	1. 25% 2. 100% 3. 5% 4. 100%	1. 25% 2. 100% 3. 5% 4. 100%	1. 25% 2. 100% 3. 5% 4. 100%	1. 70% 2. 100% 3. 45% 4. 100%	1. 27% 2. 100% 3. 10.75% 4. 100%	1. 18% 2. 100% 3. 16.50% 4. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 280% 2. 100% 3. 900% 4. 100%	1. 108% 2. 100% 3. 215% 4. 100%	1. 73.85% 2. 100% 3. 330% 4. 100%
	Keg: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota IK : Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata							2 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg :Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota IK: Pelatihan, pembinaan dan peningkatan SDM Pemandu dan tata kelola destinasi ekowisata / Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							1 Pelatihan	3 Pelatihan	1 Lokasi	-	1 Pelatihan	3 Pelatiha n	-	-	100%	100%	-	-
	Sub Keg : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota IK : Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kab. Gresik / Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							20 ODTW	25 ODTW	2 Dokume n	2 Laporan	20 ODTW	25 ODTW	2 Dokume n	2 Laporan	100%	100%	100%	100%

	Keg : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota IK : Jumlah Kawasan Strategis pariwisata							3 Kawasan	2 Kawasan	3 Kawasa n	2 Kawasan	3 Kawasan	2 Kawasa n	3 Kawasa n	2 Kawasan	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota IK : Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							1 Kawasan	2 Kawasan	3 Kawasa n	-	1 Kawasan	2 Kawasa n	3 Kawasa n	-	100%	100%	100%	-
	Sub keg: Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota IK: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							-	-	-	2 Unit	-	-	-	2 Unit	-	-	-	100%
	Keg: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota IK : jumlah kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							-	-	4 Destinasi	1 Kegiatan	-	-	4 Destinasi	1 Kegiatan	-	-	100%	100%
	Sub keg: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota IK: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							-	-	3 Laporan	2 Laporan	-	-	3 Laporan	2 Laporan	-	-	100%	100%
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA IK : 1. Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri 2. Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara			√	√			1. 2% 2. -	1. 2 % 2. 2 %	-	-	1. 3,5% 2. -	1. 95 % 2. 339%	-	-	1. 175% 2. -			
	Keg : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota IK: Jumlah Kunjungan Wisata dalam dan luar negri							2145422 Orang	2145422 Orang	2192690 Orang	2326901 Orang	2106170 Orang	4133282 Orang	4299128 Orang	4514084 Orang	98%	192%	196%	194%
	Sub keg: Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri IK : Jumlah sarana dan/atau media informasi dan promosi pariwisata baik cetak, elektronik, dan lainnya serta pengembangannya dalam rangka mendukung upaya optimalisasi promosi potensi wisata Kab Gresik							3 kegiatan	3 kegiatan	2 Dokume n	1 Dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	2 Dokume n	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
	Sub keg: Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota IK: Jumlah fasilitas event kepariwisataan di kota tua dan ekowisata							5 event	2 event	2 Laporan	1 Laporan	5 event	2 event	2 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%

	Sub keg: Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						22 ODTW	25 ODTW	1 Dokumen	1 Dokumen	22 ODTW	25 ODTW	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	
	Sub keg: Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri IK: Jumlah penguatan jaringan kerjasama pemasaran melalui berbagai event / Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						-	1 kegiatan	2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 kegiatan	2 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	100%	100%
	Sub keg: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata IK: Jumlah kegiatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pariwisata di Kab. Gresik						2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	100%	100%	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF IK : Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			√			2%	2%	-	-	7%	0,8%	-	-	350%	40%	-	-
	Keg : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar IK: Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina						40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	60 orang	100%	100%	100%	150%
	Sub keg: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar IK : Jumlah Pembinaan bagi industri Ekonomi Kreatif						2 kegiatan	3 kegiatan	50 orang	-	2 kegiatan	3 kegiatan	50 orang	-	100%	100%	100%	-
	Sub keg: Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif IK: Pemberdayaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						-	3 kegiatan	-	75 orang	-	3 kegiatan	-	213 orang	-	100%	-	284%
	Sub keg: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata IK: Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						-	-	60 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub keg: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IK: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						-	-	-	30 Laporan	-	-	-	30 Laporan	-	-	-	100%
2.	Persentase Budaya yang Dilestarikan	√	√				100%	1,35%	1,60 %	1,96%	94,93%	13,53%	1,93%	2,67%	94,93%	1.002,22%	120,63%	136.22%

	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN IK : 1. Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan 2. Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan			√				1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%
	Keg: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Objek Budaya yang dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan						10 Objek	100%	10 Objek	10 Objek	100%	10 Objek	10 Objek	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan IK: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan						2 kegiatan	3 kegiatan	4 Objek	4 Objek	2 kegiatan	3 kegiatan	4 Objek	4 Objek	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan IK: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan						17 hibah	22 hibah	50 Orang	50 Orang	17 hibah	22 hibah	50 Orang	50 Orang	100%	100%	100%	100%
	Keg: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional						3 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya IK: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan						2 Objek	3 kegiatan	3 Objek	2 Objek	2 Objek	3 kegiatan	3 Objek	2 Objek	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional IK: Jumlah Laporan pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional						-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	100%	100%	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL IK :Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan			√			-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	100%	-	-
	Keg: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah kegiatan pembinaan kesenian tradisional daerah						-	-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	100%	-	-
	Sub Keg: Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional IK: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat						-	-	20 Orang	-	-	-	20 Orang	-	-	100%	-	-

	Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)																		
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH IK :Efektifitas dokumen sejarah lokal Kabupaten Gresik			√				-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-
	Keg: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah pembinaan sejarah lokal daerah Kabupaten Gresik							-	-	1 Dokumentasi	-	-	-	1 Dokumentasi	-	-	-	100%	-
	Sub Keg: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota IK: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan							-	-	40 Orang	-	-	-	40 Orang	-	-	-	100%	-
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA IK : 1. Persentase Cagar Budaya terkelola lestarian 2. Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar 3. Persentase Cagar Budaya Ditetapkan			√				1. 100% 2. 10% 3. 100%	1. 100% 2. 10% 3. 100%	1. 100% 2. 10% 3. 100%	1. 100% 2. 10% 3. 100%	1. 100% 2. 15% 3. 100%	1. 100% 2. 15,75% 3. 100%	1. 100% 2. 13,16% 3. 100%	1. 100% 2. 0% 3. 0%	1. 100% 2. 150% 3. 100%	1. 100% 2. 157,5% 3. 100%	1. 100% 2. 131,58% 3. 100%	
	Keg: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota IK : Jumlah cagar budaya yang ditetapkan							5 CB	100%	10 CB	5 CB	0 CB	100%	10 CB	5 CB	0%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya IK: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan							1 CB	10 Potensi CB	5 Objek	5 Objek	0 CB	10 Potensi CB	5 Objek	5 Objek	0%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Penetapan Cagar Budaya IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan							5 CB	5 Potensi CB	5 Objek	5 Objek	0 CB	5 Potensi CB	5 Objek	5 Objek	0%	100%	100%	100%

	Keg: Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota IK : Jumlah cagar budaya yang dikelola							7 CB	100%	6 CB	1 CB	7 CB	100%	6 CB	1 CB	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pengembangan Cagar Budaya IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan							6 Event	1 Kawasan	2 Objek	-	6 Event	1 Kawasan	2 Objek	-	100%	100%	100%	-
	Sub Keg: Pemanfaatan Cagar Budaya IK: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan							1 Objek	-	1 Objek	1 Objek	1 Objek	-	1 Objek	1 Objek	100%	-	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN IK :Pertumbuhan kunjungan museum			√				29 %	30%	35%	42%	306 %	38,88%	35,17%	42,03%	1055%	129,6%	100,49%	100,08%
	Keg: Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota IK : Persentase Museum yang dikelola							1 museum	100%	100%	100%	1 museum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu IK: Jumlah koleksi museum terpamerkan							-	1 museum	1 Unit	1 Unit	-	1 museum	1 Unit	1 Unit	-	100%	100%	100%
	Sub Keg: Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum IK: Jumlah sarana informasi museum							-	1 museum	1 Unit	1 Unit	-	1 museum	1 Unit	1 Unit	-	100%	100%	100%
	Sub Keg: Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum IK: Jumlah sarana pameran museum							-	1 museum	1 Unit	1 Unit	-	1 museum	1 Unit	1 Unit	-	100%	100%	100%
3.	Persentase Pemuda Berprestasi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	√	√					39%	39%	41%	42,95%	60,67%	39,98%	42,91%	42,98%	155,56%	102,51%	104,66%	100,07%

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN IK :Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan			√				-	30%	30%	33%	-	33%	27,78%	41,67%	-	110%	92,6%	126,26%
	Keg: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota IK : Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota						5 Orang	5 kegiatan	200 Orang	45 Orang	10 Orang	5 kegiatan	200 Orang	45 Orang	200%	100%	100%	100%	
	Sub Keg: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Day aSaing Pemuda Pelopor IK: Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						-	5 Bidang	5 Orang	5 Orang	-	5 Bidang	5 Orang	5 Orang	-	100%	100%	100%	
	Sub Keg: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Day aSaing Wira Usaha Pemula IK: Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						180 Orang	165 Orang	-	-	200 Orang	165 Orang	-	-	111%	100%	-	-	
	Sub Keg: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Day aSaing Pemuda Kader Kabupaten/Kota IK: Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						-	1 Kegiatan	40 Orang	40 Orang	-	1 Kegiatan	104 Orang	40 Orang	-	100%	260%	100%	
	Sub Keg: Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan IK: Jumlah data monev kepemudaan						-	18 kecamatan	-	-	-	18 kecamatan	-	-	-	100%	-	-	

	Sub Keg: Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda IK:Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan						177 Orang	77 orang	-	-	154 Orang	77 orang	-	-	87%	100%	-	-
	Keg: Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Peserta Pelatihan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kab/ Kota						80 orang	1 Pelatihan	-	70 orang	50 orang	1 Pelatiha n	-	70 orang	62,5 %	100%	-	100%
	Sub Keg: Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota IK: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan						60 orang	75 orang	-	1 Dokumen	60 orang	75 orang	-	1 Dokumen	100%	100%	-	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN IK : 1. Presentase cabang Olahraga Berprestasi 2. Presentase sarana Prasarana yang Terpelihara			√			-	1. 95% 2. 80%	1. 95% 2. 80%	1. 83% 2. 100%	-	1. 96% 2. 100%	1. 87,88% 2. 100%	1. 84,21% 2. 100%	-	1. 101% 2. 125%	1. 92,5% 2. 125%	1. 101,46% 2. 100%
	Keg: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Sarana Prasarana Terpelihara						6 Unit	3 Unit Sarpras	5 Unit	5 Unit	6 Unit	3 Unit Sarpras	5 Unit	5 Unit	100%	100%	100%	100%
	Sub Keg: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota IK :Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						1 Unit	3 Gedung	5 Unit	5 Unit	1 Unit	3 Gedung	5 Unit	5 Unit	100%	100%	100%	100%
	Keg: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Cabor yang mengikuti Kejuaraan						-	3 kejuaraa n	3 Cabor	3 Cabor	-	3 kejuaraa n	3 Cabang Olahrag a	3 Cabor	-	100%	100%	100%
	Sub Keg: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota IK :Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			√			2 Cabor	14 cabor	1 Dokume n	3Dokumen	3 Cabor	14 cabor	1 Dokume n	3 Dokumen	150%	100%	100%	100%

	Sub Keg: Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota IK :Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota							-	1 Cabor	1 Dokumen	-		-	1 Cabor	1 Dokumen	-	-	100%	100%	-
	Sub Keg: Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan IK :Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan							100 Orang	-	18 Orang	-		100 Orang	-	18 Orang	-	100%	-	100%	-
	Sub Keg: Pengembangan Organisasi Keolahragaan IK : Jumlah Organisasi				√			3 Organisasi	-	-	-		3 Organisasi	-	-	-	100%	-	-	-
	Keg: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi IK : Jumlah Atlit yang dibina							-	18 Kecamatan	300 Orang	-		-	18 Kecamatan	300 Orang	-	-	100%	100%	-
	Sub Keg: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga IK :Jumlah Data							18 Data	18 Kecamatan	-	-		18 Data	18 Kecamatan	-	-	100%	100%	-	-
	Sub Keg: Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota IK :Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan							-	-	30 Orang	-		-	-	30 Orang	-	-	-	100%	-
	Sub keg: Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat IK: Jumlah Peserta							100 Orang	-	-	-		100 Orang	-	-	-	100%	-	-	-
	Keg: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga IK: Jumlah Lembaga Olahraga							-	4 Lembaga	5 Organisasi	8 Organisasi		-	4 Lembaga	6 Organisasi	3 Organisasi	-	100%	120%	37,5%
	Sub Keg: Pengembangan Organisasi Keolahragaan IK: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan							-	4 Lembaga	8 Organisasi	8 Dokumen		-	4 Lembaga	6 Organisasi	3 Dokumen	-	100%	75%	37,5%
	Keg: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi IK: Jumlah Partisipan Olahraga Rekreasi Dan Tradisional							-	100 Orang	100 Orang	300 Peserta		-	100 Orang	100 Orang	300 Peserta	-	100%	100%	100%
	Sub Keg: Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi IK: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi							-	100 Orang	3 Dokumen	3 Dokumen		-	100 Orang	3 Dokumen	3 Dokumen	-	100%	100%	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN IK: Persentase Partisipasi Anggota			√				-	54%	67%	76%		-	96,53%	96,51%	94,02%	-	178,76%	144%	123,71%

	Keg: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan IK: Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kepramukaan							-	1 Lembaga	150 Orang	92357 Org	-	1 Lembaga	150 Orang	92357 Org	-	100%	100%	100%
	Sub Keg: Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah IK: Jumlah Lembaga Penerima Hibah							1 Lembaga	1 Lembaga	1 Laporan	1 Laporan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
4.	PersentasePertumbuhan Sub sector Ekonomi Kreatif	√	√						30%	30%	38%		30,77%	30,77%	41,18%		102,57%	102,57%	108,37%
	Program Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif IK: Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan			√					-	40 Usaha	40 Usaha		-	40 Usaha	40 Usaha		-	100%	100%
	Sub keg: Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif IK: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								-	30 Orang	30 Orang		-	30 Orang	30 Orang		-	100%	100%

Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Indikator **Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata :** Realisasi tahun 2022 mencapai 4.133.282 orang/wisatawan yakni meningkat 96,25% dari tahun sebelumnya (tahun 2021) dikarenakan tahun 2021 masa pandemi covid-19. Tahun 2023 meningkat 4,01% yakni sejumlah 4.299.128 orang/wisatawan. Tahun 2024 meningkat 5% atau yakni sejumlah 4.514.084 orang/ wisatawan.
- Indikator **Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan:** Realisasi tahun 2022 budaya dilestarikan mencapai 13,35% dari tahun sebelumnya (tahun 2021). Dalam periode tahun 2022 “Sego Krawu” di tetapkan sebagai Warisan Budaya tak Benda Indonesia. Tahun 2023 budaya dilesatrikan mencapai 1.93% . Tahun 2024 budaya dilesatrikan mencapai 2,67%, tahun 2024 “Pudak” dan “Dhurung Bawean” ditetapkan sebagai Warisan Budaya tak Benda Indonesia.
- Indikator **Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga :** Realisasi tahun 2022 Pemuda berprestasi di bidang kepemudaan sebesar 39,98% dari target sebesar 39% . Tahun 2023 Pemuda berprestasi di bidang kepemudaan sebesar 42,91% dari target sebesar 41%. Realisasi tahun 2024 Pemuda berprestasi di bidang kepemudaan sebesar 42,98% dari target sebesar 42,95%.
- Indikator **Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian:** Realisasi tahun 2022 pertumbuhan sub sektor pelaku ekonomi kreatif sebesar 30,77% dari yang ditargetkan sebesar 30%. Realisasi tahun 2023 pertumbuhan sub sektor pelaku ekonomi kreatif sebesar 30,77% dari yang ditargetkan sebesar 30%. Realisasi tahun 2024 pertumbuhan sub sector pelaku ekonomi kreatif sebesar 41,18% dari yang ditargetkan sebesar 38%.

Selain review capaian indikator kinerja perangkat daerah, diperlukan juga review pendanaan dan realisasi anggaran perangkat daerah periode sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah khususnya dalam hal manajemen penganggaran, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik 5 (lima) Tahun ke depan. Review anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gresik**

SASARAN	ANGGARAN TAHUN KE –			REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -			CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN KE -		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1.130.630.000,00	1.201.104.800,00	949.999.749,00	1.095.720.878,20	1.038.273.399,00	645.653.793,83	96,91	86,44	67,96
Meningkatnya Pelestarian, Pemanfaatan dan Pengembangan Kebudayaan	3.339.435.000,00	2.990.932.732,00	2.790.999.900,00	3.291.233.706,80	2.738.122.082,50	2.000.473.337,00	98,56	91,55	71,68
Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.860.549.966,00	22.562.403.845,00	30.023.365.436,00	28.657.788.705,15	21.589.223.921,55	28.566.213.665,95	95,97	95,69	95,15
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Perekonomian Kepemudaan dan Olahraga	544.845.000,00	451.950.000,00	600.005.015,00	508.746.500,00	447.333.589,00	464.544.597,00	93,37	98,98	77,42
JUMLAH	34.875.459.966,00	27.206.391.377,00	34.364.370.100,00	33.553.489.790,15	25.812.952.992,05	31.676.885.393,78	96,21	94,88	92,18

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Kelompok sasaran layanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain :

1. Masyarakat umum pengguna layanan baik pinjam pakai sarana prasarana olahraga, GNI dan bus wisata .

2.1.5. Mitra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam pemberian layanan antara lain :

1. Organisasi Olahraga yakni KONI dan NPCI
2. Kwarcab Pramuka
3. Pokdarwis Kabupaten Gresik
4. Cak Yuk Kabupaten Gresik

2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan dan Peluang

Dari hasil review pelayanan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik baik review capaian indikator kinerja maupun review realisasi anggaran, dimana telah ditemukan beberapa kendala-kendala dalam proses pelayanan perangkat daerah yang kemudian dapat di rekapitulasi menjadi tantangan-tantangan dan peluang yang harus Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 5 Tahun ke depan. Beberapa tantangan tersebut antara lain :

Tabel 2.5 Tantangan dan Peluang yang dihadapi beserta Rekomendasi

BIDANG	PELUANG	TANTANGAN	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)	(4)
Pariwisata (Destiansi)	- Kawasan Mangrove di Kabupaten Gresik tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Bungah, Kec. Manyar dan Kec. Sangkapura Pulau Bawean - Memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial masyarakat serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan - Dukungan dari Pemerintah, Swasta dan Partisipasi masyarakat ekowisata mangrove dapat menjadi Destinasi Wisata Unggulan di Kabupaten Gresik	- Keterbatasan aksesibilitas - Kurangnya pengetahuan tentang konsep ekowisata - Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi mangrove dan dampak positif ekowisata terhadap lingkungan dan ekonomi lokal	- Perlu adanya Zonasi pengelolaan yang jelas untuk konservasi dan pemanfaatan ekowisata - Integrasi antara ekowisata dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar - Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui pelatihan dan edukasi tentang pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove serta pelatihan sertifikasi kompetensi pemandu ekowisata - Upaya pelestarian ekosistem mangrove melalui penanaman bibit mangrove dan menjaga kebersihan kawasan ekowisata - Adanya kajian tentang Pengembangan dan Revitalisasi Ekowisata
Pariwisata (Pemasaran)	Promosi dan Branding Pariwisata Gresik	- Kurangnya Citra Destinasi yang Kuat - Identitas belum jelas: Gresik dikenal sebagai kota industri dan kota santri, tetapi belum berhasil membangun citra kuat sebagai destinasi wisata.	Rebranding destinasi dengan narasi kuat (misalnya "Gresik: Jejak Wali dan Eksotisme Pulau"). Penguatan digital marketing melalui konten kreatif, influencer, dan kampanye media sosial. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata melalui dana pemerintah dan kolaborasi swasta. Pemberdayaan masyarakat lokal dan

		• Minimnya narasi unik: Cerita atau daya tarik khas Gresik seperti wisata religi (Makam Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim) atau wisata bahari (Pulau Bawean) belum dikemas secara konsisten. 2. Promosi yang Kurang Terintegrasi • Kurangnya strategi pemasaran terpadu: Promosi masih bersifat sporadis dan belum menyasar target pasar yang spesifik (misalnya milenial, wisatawan religi, atau wisatawan mancanegara). • Minim pemanfaatan digital marketing: Platform seperti media sosial, YouTube, dan blog perjalanan belum dimaksimalkan untuk mempromosikan Gresik secara masif dan menarik. 3. Keterbatasan Aksesibilitas dan Infrastruktur • Transportasi umum terbatas: Beberapa destinasi	UMKM dalam ekosistem wisata. 5. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dengan event, festival, dan promosi lintas daerah.
--	--	---	--

		seperti Bawean cukup sulit dijangkau, sehingga mengurangi minat wisatawan. • Fasilitas wisata masih kurang: Kurangnya penginapan, pusat informasi wisata, toilet umum, dan papan penunjuk jalan di lokasi wisata menghambat kenyamanan pengunjung. 4. Minimnya Kolaborasi Stakeholder • Kurangnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal: Promosi pariwisata belum melibatkan komunitas, UMKM, atau travel agent secara optimal. • Edukasi masyarakat lokal rendah: Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan potensi dan pentingnya sektor pariwisata bagi ekonomi lokal. 5. Persaingan dengan Daerah Sekitar	
--	--	--	--

		• Bersaing dengan destinasi populer di Jawa Timur: Gresik harus bersaing dengan Malang, Batu, Banyuwangi, dan Surabaya yang lebih dulu dikenal sebagai tujuan wisata. • Kurangnya atraksi berskala besar: Belum banyak event atau atraksi unik berskala nasional yang dapat menarik wisatawan datang khusus ke Gresik. 6. Isu Keberlanjutan dan Lingkungan • Limbah industri dan pencemaran: Sebagai kota industri, Gresik menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan agar tetap ramah wisata. • Kurangnya pengelolaan destinasi berkelanjutan: Beberapa objek wisata belum memiliki sistem pengelolaan yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat.	
--	--	--	--

Ekonomi Kreatif	1. Tumbuhnya Komunitas dan pelaku ekonomi kreatif secara organik 2. Potensi subsektor unggulan, kriya, kuliner, music, film, dan seni pertunjukan 3. Kolaborasi dengan industry Kemitraan dengan kampus	1. Fragmentasi pelaku berjalan sendiri – sendiri 2. Keterbatasan SDM dan fasilitator pendampingan 3. Belum meratanya pemahaman tentang perlindungan karya	1. Perlu SDM fasilitator bersertifikasi untuk program inkubasi 2. Regulasi ekonomi kreatif di daerah 3. Pendampingan berbasis kolaborasi multi pihak 4. Penguatan ekosistem digital dan akses pasar 5. Optimalisasi peran CSR dan jejaring industri
Kebudayaan	1. Potensi komunitas budaya lokal yang aktif 2. Warisan budaya dan identitas lokal kuat 3. Kebijakan nasional dan daerah mendukung pemajuan kebudayaan 4. Kemitraan dengan swasta dan CSR 5. Teknologi dan media social sebagai sarana promosi	1. Desain fisik ruang publik tidak ramah seni budaya 2. Kurangnya kegiatan rutin atau aktivasi budaya 3. Minimnya pendanaan untuk program budaya 4. Kurang terlibatnya komunitas lokal dalam perencanaan 5. Belum ada regulasi teknis tata Kelola ruang publik budaya	1. Perancangan ruang public dengan mempertimbangkan fungsi ekspresi budaya 2. Melibatkan komunitas budaya lokal dalam membuat program seni regular, panggung rakyat, kelas seni terbuka dan pameran 3. Anggaran khusus aktivasi sosial budaya, baik itu dana dari APBD, CSR dan kolaborasi untuk mendukung program seni budaya di ruang public 4. Replikasi model taman budaya atau creative hub yang sudah ada 5. Menyusun regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang public untuk kegiatan budaya secara inklusif dan terjadwal

Kepemudaan dan Olahraga	Memberdayakan Pemuda untuk membuka usaha berbasis digital	Kurangnya kegiatan bagi pemuda dan minimnya reward bagi pemuda berprestasi	Fasilitasi kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendanaan bagi wirausaha muda, pemberian reward bagi pemuda berprestasi serta fasilitasi sarana dan prasarana bagi pemuda sebagai wadah kreativitas pemuda
	Memberdayakan promotor/penggerak olahraga masyarakat untuk mengkampanyekan hidup sehat	Kurangnya minat masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga	Mendorong kesadaran masyarakat dengan mengadakan kegiatan olahraga di lingkungan sekitar

2.1.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Gresik tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu “**Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat**” diperlukan langkah - langkah strategis yang terarah dan sistematis. Oleh karena itu, visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah selama periode 2025-2029. Rumusan misi Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

1. **Misi Pertama** : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
2. **Misi Kedua** : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. **Misi Ketiga** : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
4. **Misi Keempat** : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.
5. **Misi Kelima** : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebagai salah satu Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab atas urusan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gresik melalui sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga perlu melakukan telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah terpilih agar dapat mengidentifikasi permasalahan meliputi faktor pendukung dan penghambat pencapaian Visi dan Misi bupati terpilih. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Misi, Tujuan, Sasaran Dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 terkait dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Misi 1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development)	Indeks Kesalehan Sosial	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni
	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Harapan Lama Sekolah*
	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Inklusi (GEDSI)
Misi 2 : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.			
Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (advanced indigenous economy)	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor

2.1.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam rangka Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 maka perlu melakukan telaah pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik yang berasal dari Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun dari perangkat daerah di tingkat Provinsi. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan secara lebih luas.

1. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pariwisata

a. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

Pada rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Pariwisata terdapat sasaran Meningkatkan kualitas pariwisata. Dengan ukuran keberhasilan/indikator yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara, Devisa Pariwisata.

2. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif

a. Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah

Pada rencana strategis yang disusun kementerian Ekonomi kreatif terdapat sasaran Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi kreatif serta penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI).

3. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Kebudayaan

a. Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

Pada rencana strategis kementerian kebudayaan yaitu berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya nasional, pengembangan museum juga menjadi perhatian utama.

4. Keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

a. Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga

b. Perlindungan Sosial Inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan

Pada rencana strategis kementerian pemuda dan olahraga yaitu peningkatan daya saing pemuda dan pengembangan kepramukaan, serta

peningkatan prestasi olahraga di level regional maupun internasional.

5. Keterkaitan dengan Renstra Provinsi Jawa Timur

- Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi local
- Konektivitas antar objek wisata melalui koridor maritime dan logistic pantai utara
- Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan /desa
- Pelestarian budaya lokal dan identitas daerah dengan mendokumentasikan seni budaya local serta mendukung pertunjukan tradisional dalam rangka memperkuat daya tarik budaya sebagai bagian dari pariwisata
- Menjalin sinergis dan koordinasi / kemitraan dengan Pemprov Jatim dalam program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melestarikan kebudayaan, meningkatkan prestasi pemuda di bidang kepemudaan dan olahraga. Keempat sektor ini memiliki keterkaitan erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat identitas budaya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik terus melakukan berbagai program dan kegiatan strategis. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata, meningkatkan sub sektor ekonomi kreatif unggulan, meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, meningkatkan prestasi pemuda bidang kepemudaan dan olahraga, serta perlindungan sosial inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi guna

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Permasalahan dalam pelayanan perangkat daerah ini dapat berasal dari berbagai aspek, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, promosi, partisipasi masyarakat, hingga kendala regulasi dan pendanaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi agar dapat merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik perlu merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada periode 2025-2029. Isu strategis ini mencerminkan aspek-aspek utama yang harus mendapatkan perhatian guna mewujudkan pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Adapun permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dapat dideskripsikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.7

Permasalahan & Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. URUSAN/ BIDANG PARIWISATA						
	1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata	Berkurangnya luasan hutan mangrove	Hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, krisis air dan deforestasi	Pengurangan luas area mangrove, degradasi ekosistem dan perlunya pengelolaan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat pesisir	Alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak udang dan ikan, pemukiman, perkebunan dan infrastruktur lainnya menjadi penyebab utamanya berkurangnya luas hutan mangrove	Pengembangan dan Revitalisasi Ekowisata
	2. Kurang optimalnya Pusat Informasi Pariwisata Terpadu/ TIC Disparekrafbudpora	Masifnya kegiatan industri mempengaruhi penurunan kualitas udara	Kurangnya informasi yang terdistribusi secara merata dari TIC membuat wisatawan cenderung hanya mengunjungi destinasi populer. Ini menyebabkan penumpukan wisatawan (over-tourism) di lokasi tertentu yang memberi tekanan besar pada lingkungan alam, ekosistem, dan infrastruktur setempat.	Limbah industri dan pencemaran: Sebagai kota industri, Kabupaten Gresik menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan agar tetap ramah wisata	Pemberdayaan Masyarakat & Pengelola ODTW Serangkaian Bimtek dan seminar (pariwisata bersih, ekowisata pesisir, desa budaya) yang diadakan Disparekrafbudpora melatih masyarakat lokal, pelaku Wisata dan Pokdarwis untuk mengembangkan pariwisata ramah lingkungan yang berkelanjutan	Kurangnya pengelolaan Promosi Wisata bersih berkelanjutan: Beberapa objek wisata belum memiliki sistem pengelolaan yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat.
URUSAN/ BIDANG EKONOMI KREATIF						

	1. Keterbatasan anggaran promosi, inkubasi, dan distribusi produk ekraf	Efisiensi pemanfaatan SDA untuk produk subsektor kriya	Disrupsi teknologi dan AI yang berdampak pada tenaga kreatif konvensional	Ekonomi digital sebagai prioritas Nasional dalam RPSMN 2025 – 2029	Belum meratanya jejaring ekraf	Belum terbentuknya ekosistem ekraf yang kolaboratif dan berkelanjutan
	2. Belum adanya sistem pendataan dan pemetaan potensi pelaku secara menyeluruh	Ketersediaan dan pengelolaan limbah pada industri kreatif		Peningkatan kontribusi ekonomi hijau dan biru		Minimnya data potensi dan peta jalan subsektor unggulan
		Adaptasi perubahan iklim untuk pelaku usaha pesisir				Kurangnya inovasi dan transformasi digital pada pelaku ekraf
						Perluasan akses terhadap Hak kekayaan intelektual
URUSAN / BIDANG KEBUDAYAAN						
	1. Pelestarian dan apresiasi kebudayaan belum partisipatif	Ruang publik utk pengembangan kreativitas minat/bakat	1. Akses yang tidak merata terhadap ruang publik inklusif 2. Komersialisasi dan privatisasi ruang publik 3. Kurangnya fasilitas penunjang kreativitas di wilayah perkotaan dan perdesaan 4. Fragmentasi	6. Keterbatasan ruang publik yang fungsional dan inklusif 7. Ketimpangan akses ruang kreatif antara wilayah perkotaan dan perdesaan 8. Rendahnya keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan ruang public	12. Revitalisasi Kota Tua Bandar Grisee sebagai ruang public kreatif 13. Pemanfaatan Gedung DPRD sebagai Rumah Budaya Publik 14. Ruang komunitas literasi dan seni di Sualoka Hub 15. Minimnya	1. Ruang publik belum mendukung seni dan budaya local 2. Kurangnya integrasi perencanaan antar-perangkat daerah 3. Belum tersedianya infrastruktur khusus kreativitas yang inklusif Rendahnya pendampingan dan program pembinaan talenta local

			antara ruang digital dan fisik 5. Peran ruang publik dalam resiliensi sosial dan ekologis	produktif 9. Kurangnya integrasi antarsektor dalam pengembangan ruang kreatif 10. Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas 11. Minimnya partisipasi Masyarakat dalam perencanaan ruang publik	fasilitas sarana permanen untuk kreativitas 16. Koordinasi antar-pemangku dan kebijakan kebudayaan	
URUSAN/ BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	(Kegiatan Kepemudaan) Kurangnya peningkatan kapasitas pemuda dan menumbuhkan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah.	Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda karena ada beberapa kegiatan terutama pada Pelatihan Kewirausahaan yang juga berkaitan dengan program/Kegiatan OPD lainnya seperti Diskoperindag	Menghadapi persaingan dengan negara lain serta adanya tantangan di era global yang semakin kompleks	Memberikan dukungan dan ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi aktif melalui program pelatihan, pembinaan dan pendanaan	1. Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 18 Kecamatan 2. Kegiatan kepemudaan dirasakan masih minim dikarenakan tidak semua anggaran kegiatan khusus kepemudaan menyentuh ke	Minimnya kegiatan pengembangan Potensi dan Partisipasi Pemuda 2. Minimnya program Kewirausahaan Pemuda yang berkelanjutan

					beberapa wilayah di kecamatan/desa; 3. Minimnya sarana dan prasarana Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pemuda.	
	Belum meratanya pembangunan sarana prasarana olahraga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana olahraga	Belum meratanya atlet berprestasi yang dapat memperoleh prestasi di ajang internasional	Belum tercapainya tujuan indeks pembangunan olahraga nasional di daerah	Kurangnya minat masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga	Kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya hidup sehat
	Belum terkoordinasinya Induk Olahraga Masyarakat di Kabupaten Gresik	Belum adanya KORMI di Kabupaten Gresik	Kesulitan dalam mengikuti kejuaraan internasional	Kesulitan dalam mengikuti kejuaraan nasional	Kesulitan dalam mengikuti kejuaraan regional	Kurangnya publikasi maupun pengenalan kegiatan olahraga masyarakat



pesona
Indonesia

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GRESIK

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Gresik merupakan turunan dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang terumuskan ke dalam RPJMD Kabupaten Gresik. Berikut gambaran perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gresik**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.2.22.2.19.02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan kualitas dan akseblitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata, sub sektor ekonomi kreatif unggulan daerah, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Kebudayaan, prestasi pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, pemberdayaan kelompok rentan		Harapan Lama Sekolah (Tahun)				13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	√		√	10,01	10,37	10,49	10,62	10,81	10,92	10,99	
			Indeks Harmoni (Index)	√			3,77	3,78	3,79	3,8	3,81	3,82	3,83	
			Indeks Pemerintah Digital (Angka)	√			4,32	0-4.37	1.79-2.1	1.89-2.25	1.99-2.39	2.09-2.54	2.19-2.68	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	√			1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Rasio Net Ekspor (%)				10,51	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80	
			Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)				-	25-35	30-40	35-45	40-50	45-55	50-60	
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)				A	A	A	A	AA	AA	AA	
			Rasio Government Expenditure (%)				11,79	40	45	45	45	45	45	

		Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)	√			42,98	43	43	43	44	44	45	
		Perlindungan Sosial Inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas (%)		√		10	10	10	10	11	11	12	
		Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)		√		4	4	6,25	6,25	8,3	8,3	10	
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	√	√		5	7	2	2	2	2,2	2,5	
		Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah	Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah (%)	√			2	2	2	2	2	2	4	

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada table di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fokus pada fondasi internal: kepemudaan, kepramukaan, prasarana, dan museum	Fokus pada memperkuat kapasitas SDM olahraga dan kesadaran budaya	Fokus mulai mendorong sektor pariwisata dan pelestarian kesenian	Fokus pada ekspansi ke ekonomi kreatif dan pelestarian sejarah	Fokus untuk sustainability, replikasi, dan evaluasi program

Keterangan :

Tahap 1 (Tahun 2026): FONDASI & PEMBANGUNAN DASAR

Fokus: Penyiapan infrastruktur, penguatan partisipasi dasar, dan pemetaan potensi.

1. Pemuda & Kepemudaan

Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan pemuda.

Pendataan pemuda berprestasi dan pembinaan awal.

Kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan karang taruna.

2. Kepramukaan

Revitalisasi kegiatan kepramukaan berbasis sekolah dan desa.

Pelatihan pembina pramuka.

Dukungan sarana kegiatan pramuka (tenda, alat peraga, dll).

3. Olahraga

Inventarisasi dan perawatan sarana olahraga.

Pendataan cabor dan atlet potensial.

Pembinaan awal untuk penyandang disabilitas.

4. Permuseuman

Peningkatan fasilitas dasar museum.

Edukasi pelajar dan komunitas tentang sejarah lokal.

Promosi museum melalui media sosial dan sekolah.

Tahap 2 (Tahun 2027): PENGUATAN SDM & KAPASITAS KULTURAL

Fokus: Meningkatkan kualitas SDM serta kesadaran dan partisipasi budaya.

1. Olahraga

Seleksi dan pembinaan atlet menuju pelatnas.

Peningkatan prestasi cabang olahraga (kompetisi, turnamen).

Pelatihan untuk pelatih dan pengurus olahraga disabilitas.

2. Budaya dan Kesenian

Festival budaya daerah tingkat kecamatan/kabupaten.

Pelatihan dan fasilitasi kelompok seni tradisional.

Dukungan hibah alat seni dan kostum tradisional.

3. Pariwisata

Survei kepuasan masyarakat dan wisatawan.

Pelatihan pemandu wisata lokal.

Workshop promosi pariwisata digital.

Tahap 3 (Tahun 2028): OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA DAN WARISAN BUDAYA

Fokus: Pengembangan destinasi dan pelestarian budaya sebagai daya tarik utama.

1. Kesenian & Cagar Budaya

Fasilitasi kelompok seni agar tampil di luar daerah.

Pendokumentasian kesenian tradisional.

Penetapan situs cagar budaya yang lolos kurasi.

2. Pariwisata

Rehabilitasi atau pengembangan destinasi wisata.

Pemasangan infrastruktur pendukung (papan informasi, toilet umum, area UMKM).

Peningkatan kerjasama dengan OPD dan sektor swasta.

3. Museum

Penambahan koleksi tematik museum.

Integrasi program kunjungan museum dengan sekolah dan operator wisata.

Digitalisasi informasi koleksi museum.

Tahap 4 (Tahun 2029): PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF & KEKUATAN DAERAH

Fokus: Pemanfaatan hasil pembinaan untuk pertumbuhan ekonomi kreatif dan legalisasi kekayaan budaya.

1. Ekonomi Kreatif

Pendataan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif.

Pelatihan manajemen bisnis kreatif (branding, packaging, pemasaran digital).

Fasilitasi pelaku untuk memperoleh sertifikasi HAKI (kekayaan intelektual).

2. Warisan Budaya

Legalitas dan penetapan warisan budaya tak benda.

Pemberian sertifikat dan pengakuan resmi kepada pelaku budaya.

Publikasi hasil penetapan dalam buku atau katalog daerah.

3. Sejarah Lokal

Workshop sejarah lokal untuk guru & komunitas.

Penulisan dan penerbitan sejarah lokal Gresik.

Pameran tematik hasil riset sejarah.

Tahap 5 (Tahun 2030): EVALUASI, REPLIKASI & KEBERLANJUTAN

Fokus: Peninjauan program, perbaikan berkelanjutan, dan replikasi di wilayah baru.

1. Evaluasi Program

Monitoring capaian indikator setiap program.

Audit independen terhadap efektivitas anggaran dan dampak sosial.

Forum dialog publik dengan masyarakat dan stakeholder.

2. Replikasi & Skalabilitas

Menyusun dokumen "Best Practice" program unggulan.

Pendampingan wilayah atau desa lain untuk menerapkan model yang sukses.

Penyesuaian kebijakan daerah untuk mendukung kesinambungan.

3. Integrasi Lintas Sektor

Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Ekonomi, Koperasi, Perindustrian, dan Kominfo.

Penyesuaian arah program berdasarkan dinamika ekonomi dan sosial terbaru.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkain kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gresik

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan Kesehatan yang adil, merata, dan bermutu melalui kepemimpinan	Memastikan masyarakat terutama kelompok rentan dan miskin memperoleh layanan yang berkualitas,	

		daerah yang berorientasi pada pelayanan public dan perlindungan kelompok rentan.	merata, berkeadilan dan berkesinambungan	
2	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi social dalam pembangunan daerah dan desa	Meningkatkan akses kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin terhadap pelatihan kerja, kewirausahaan, dan sumber daya ekonomi yang produktif untuk mempersempit kesenjangan ekonomi dan memperkuat kemandirian.	Mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan daerah dan desa serta, Memberdayakan masyarakat kelompok rentan dalam pembangunan daerah dan desa.	
3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif	Memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif melalui pendekatan berbasis hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; serta menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang ramah anak dan bebas kekerasan	Memperkuat sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor	



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan.

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik. 131

4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik. 133

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029**

Dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta penetapan tujuan, sasaran dan strategi maka rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat disusun dalam program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik sebagaimana berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah
 - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
 - Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

- a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

7. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

- a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten / Kota

8. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya
- b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
 - Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya

9. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

- a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

10. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Kesiediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

12. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Pengembangan Pendidikan
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

13. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Sub Kegiatan Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
- Sub Kegiatan Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
- Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.26.2.22.2.19.02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata, sub sektor ekonomi kreatif unggulan daerah, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Kebudayaan, prestasi pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, pemberdayaan kelompok rentan				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))		
					Indeks Harmoni (Index)		
					Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Rasio Net Ekspor (%)		
					Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (%)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)		
					Rasio Government Expenditure (%)		

		Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga			Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan		Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Jumlah Kabupaten/ Kota dengan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	

					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Jumlah Peserta Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Kab/ Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Persentase cabor berprestasi (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Persentase sarana prasarana olahraga yang terpelihara (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Jumlah sarana dan Prasarana yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

				Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Jumlah Atlit yang dibina	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

				Jumlah Peserta Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Perlindungan Sosial Inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan			Persentase Pembinaan Atlet Disabilitas (%)		
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Persentase cabor berprestasi (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

					Persentase sarana prasarana olahraga yang terpelihara (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Jumlah sarana dan Prasarana yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Jumlah Atlit yang dibina	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Jumlah Peserta Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan			Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (Orang)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Jumlah Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (Orang)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Jumlah kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	

				Jumlah kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
			Meningkatnya tata kelola museum		Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke museum (%)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Jumlah Museum yang dikelola	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata			Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)		

			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase destinasi wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan) (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

				Jumlah kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Penetapan Tanda Daftar Usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

				Pariwisata			
					Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	3.26.02.2.04.0011 - Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Nilai survey perspektif masyarakat terhadap pariwisata gresik (Nilai)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Jumlah Promosi Pariwisata dan Jumlah Fasilitas Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah			Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah (%)		

			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Persentase sarana prasarana Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Jumlah Kekayaan Intelektual yang di daftarkan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	

					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Jumlah sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
					Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	3.26.05.2.02.0004 - Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur serta terukur termasuk kerangka pendanaan/ rencana anggarannya. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Gresik maju yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah table Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				25.951.658.000		26.721.323.000		27.702.568.000		29.090.385.000		29.978.479.000		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.635.179.000		13.009.909.000		13.487.651.000		14.163.343.000		14.595.732.000		
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	12.635.179.000	100	13.009.909.000	100	13.487.651.000	100	14.163.343.000	100	14.595.732.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000		120.000.000		160.000.000		160.000.000		190.000.000		
Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	105.000.000	6	120.000.000	6	160.000.000	6	160.000.000	6	190.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		75.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	40.000.000	8	50.000.000	8	55.000.000	8	55.000.000	8	75.000.000		
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	15.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	30.000.000		
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.315.000.000		7.415.000.000		7.520.000.000		7.520.000.000		7.520.000.000		
Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4	7.315.000.000	4	7.415.000.000	4	7.520.000.000	4	7.520.000.000	4	7.520.000.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	48		48		48		48		48			
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.300.000.000		7.400.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	48	7.300.000.000	48	7.400.000.000	48	7.500.000.000	48	7.500.000.000	48	7.500.000.000		
2.19.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				673.000.000		783.000.000		850.000.000		910.000.000		990.000.000		
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	673.000.000	2	783.000.000	2	850.000.000	2	910.000.000	2	990.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		225.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000		
2.19.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				73.000.000		73.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	73.000.000	2	73.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				135.000.000		135.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	135.000.000	4	135.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	25.000.000	3	25.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000		
2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000		

2.19.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				150.000.000		260.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	260.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000		0		150.000.000		840.000.000		1.010.000.000		
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	80.000.000	0	0	0	150.000.000	1	840.000.000	1	1.010.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2		0		0		2		2			
2.19.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		150.000.000		200.000.000		230.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0	1	0	1	150.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000		
2.19.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				80.000.000		0		0		40.000.000		200.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	80.000.000	0	0	0	0	2	40.000.000	2	200.000.000		
2.19.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		500.000.000		550.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	1	550.000.000		
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		100.000.000		30.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	30.000.000		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.450.000.000		3.450.000.000		3.550.000.000		3.600.000.000		3.700.000.000		
Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	3.450.000.000	4	3.450.000.000	4	3.550.000.000	4	3.600.000.000	4	3.700.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109	111		111		111		111		111			

	yang Disediakan (Laporan)													
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.000.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		3.200.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	109	111	3.000.000.000	111	3.000.000.000	111	3.100.000.000	111	3.100.000.000	111	3.200.000.000		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.012.179.000		1.241.909.000		1.257.651.000		1.133.343.000		1.185.732.000		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	12	1.012.179.000	12	1.241.909.000	12	1.257.651.000	12	1.133.343.000	12	1.185.732.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	1		1		1		1		1			
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		

	(Unit)													
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		350.000.000		350.000.000		358.343.000		400.732.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	358.343.000	12	400.732.000		
2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				392.179.000		540.000.000		550.000.000		460.000.000		470.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	392.179.000	2	540.000.000	2	550.000.000	2	460.000.000	2	470.000.000		
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		231.909.000		237.651.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000	1	231.909.000	1	237.651.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				333.541.000		343.433.000		356.044.000		373.881.000		385.295.000		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan (%)	33	47,5	333.541.000	52,12	343.433.000	53,33	356.044.000	53,33	373.881.000	53,33	385.295.000	3.26.2.22.2.19.02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN	

													KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				213.541.000		223.433.000		236.044.000		253.881.000		255.295.000		
Jumlah Kabupaten/ Kota dengan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0	6	213.541.000	8	223.433.000	8	236.044.000	8	253.881.000	8	255.295.000		
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota				0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	0	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				100.000.000		80.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0	6	100.000.000	8	80.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000		
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				43.541.000		43.433.000		56.044.000		73.881.000		75.295.000		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	0	1	43.541.000	1	43.433.000	1	56.044.000	1	73.881.000	1	75.295.000		

2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	5	5	70.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000		
Jumlah Peserta Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Kab/ Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	130.000.000		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	130.000.000		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				11.475.250.000		11.815.579.000		12.249.464.000		12.863.126.000		13.255.822.000		
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	7,5	10	11.475.250.000	12,5	11.815.579.000	15	12.249.464.000	17,5	12.863.126.000	20	13.255.822.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
	Persentase sarana prasarana olahraga yang terpelihara (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase cabor berprestasi (%)	84,21	84,3		84,5		84,7		84,75		85			
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.950.000.000		4.000.000.000		4.100.000.000		4.300.000.000		4.500.000.000		

Jumlah sarana dan Prasarana yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	5	3.950.000.000	5	4.000.000.000	5	4.100.000.000	5	4.300.000.000	5	4.500.000.000		
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				3.950.000.000		4.000.000.000		4.100.000.000		4.300.000.000		4.500.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	5	3.950.000.000	5	4.000.000.000	5	4.100.000.000	5	4.300.000.000	5	4.500.000.000		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	80	1.200.000.000	105	1.200.000.000	130	1.200.000.000	155	1.200.000.000	180	1.200.000.000		
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	80	300.000.000	105	300.000.000	130	300.000.000	155	300.000.000	180	300.000.000		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
Jumlah Atlit yang dibina	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0	60	800.000.000	75	1.000.000.000	90	1.200.000.000	100	1.400.000.000	110	1.400.000.000		
	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0	0		20		20		20		20			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	0		20		20		20		20			
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	0	0	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		

2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				800.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0	60	800.000.000	75	800.000.000	90	1.000.000.000	100	1.200.000.000	110	1.200.000.000		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	0	0	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5.000.000.000		5.200.000.000		5.300.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000		
Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	2	5.000.000.000	2	5.200.000.000	2	5.300.000.000	2	5.500.000.000	2	5.700.000.000		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				5.000.000.000		5.200.000.000		5.300.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	2	5.000.000.000	2	5.200.000.000	2	5.300.000.000	2	5.500.000.000	2	5.700.000.000		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				525.250.000		415.579.000		449.464.000		463.126.000		455.822.000		
Jumlah Peserta Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3	4	525.250.000	4	415.579.000	4	449.464.000	4	463.126.000	4	455.822.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				175.250.000		215.579.000		249.464.000		263.126.000		255.822.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3	4	175.250.000	4	215.579.000	4	249.464.000	4	263.126.000	4	255.822.000		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.507.688.000		1.552.402.000		1.609.409.000		1.690.035.000		1.741.630.000		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	94,02	96	1.507.688.000	96	1.552.402.000	96	1.609.409.000	96	1.690.035.000	96	1.741.630.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.507.688.000		1.552.402.000		1.609.409.000		1.690.035.000		1.741.630.000		
Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	1	1.507.688.000	1	1.552.402.000	1	1.609.409.000	1	1.690.035.000	1	1.741.630.000		
2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1.507.688.000		1.552.402.000		1.609.409.000		1.690.035.000		1.741.630.000		
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	1	1.507.688.000	1	1.552.402.000	1	1.609.409.000	1	1.690.035.000	1	1.741.630.000		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.013.212.000		2.072.918.000		2.149.040.000		2.256.700.000		2.325.595.000		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.047.178.000		1.071.200.000		1.104.576.000		1.155.923.000		1.185.181.000		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (Orang)	130.000	150.500	1.047.178.000	153.000	1.071.200.000	156.000	1.104.576.000	158.000	1.155.923.000	160.000	1.185.181.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				670.000.000		670.000.000		700.000.000		710.000.000		730.000.000		
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	2	670.000.000	2	670.000.000	3	700.000.000	4	710.000.000	5	730.000.000		

	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50	40		40		45		45		50		
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				350.000.000		350.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	2	350.000.000	2	350.000.000	3	370.000.000	4	380.000.000	5	390.000.000	
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				320.000.000		320.000.000		330.000.000		330.000.000		340.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50	40	320.000.000	40	320.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000	50	340.000.000	
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				377.178.000		401.200.000		404.576.000		445.923.000		455.181.000	
Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	2	377.178.000	2	401.200.000	2	404.576.000	2	445.923.000	2	455.181.000	
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2	2		3		3		3		4		
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				327.178.000		321.200.000		294.576.000		315.923.000		325.181.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2	2	327.178.000	3	321.200.000	3	294.576.000	3	315.923.000	4	325.181.000	
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				50.000.000		80.000.000		110.000.000		130.000.000		130.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	2	50.000.000	2	80.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				75.000.000		84.000.000		90.000.000		99.000.000		103.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	10	20	75.000.000	20	84.000.000	20	90.000.000	30	99.000.000	30	103.000.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH

													RAGA	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		84.000.000		90.000.000		99.000.000		103.000.000		
Jumlah Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0	40	75.000.000	40	84.000.000	40	90.000.000	40	99.000.000	40	103.000.000		
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	10		10		15		15		20			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				50.000.000		57.000.000		60.000.000		65.000.000		68.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0	40	50.000.000	40	57.000.000	40	60.000.000	40	65.000.000	40	68.000.000		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				25.000.000		27.000.000		30.000.000		34.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	10	25.000.000	10	27.000.000	15	30.000.000	15	34.000.000	20	35.000.000		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				25.000.000		26.000.000		30.000.000		31.000.000		37.000.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (Orang)	280.000	350.000	25.000.000	375.000	26.000.000	400.000	30.000.000	425.000	31.000.000	455.000	37.000.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		26.000.000		30.000.000		31.000.000		37.000.000		
Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	20	25.000.000	20	26.000.000	25	30.000.000	25	31.000.000	30	37.000.000		
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				25.000.000		26.000.000		30.000.000		31.000.000		37.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	20	25.000.000	20	26.000.000	25	30.000.000	25	31.000.000	30	37.000.000		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				139.149.000		143.275.000		148.537.000		155.978.000		160.740.000		

Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	10	10	139.149.000	10	143.275.000	12,5	148.537.000	12,5	155.978.000	14	160.740.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2	6,25		6,25		8,3		8,3		10			
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				64.149.000		68.275.000		68.537.000		70.978.000		70.740.000		
Jumlah kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	5	10	64.149.000	10	68.275.000	10	68.537.000	10	70.978.000	10	70.740.000		
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5	5		5		5		5		5			
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				20.000.000		23.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5	5	20.000.000	5	23.000.000	5	23.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				44.149.000		45.275.000		45.537.000		45.978.000		45.740.000		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	5	10	44.149.000	10	45.275.000	10	45.537.000	10	45.978.000	10	45.740.000		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Jumlah kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	21	75.000.000	21	75.000.000	23	80.000.000	23	85.000.000	25	90.000.000		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	1		1		1		1		1			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				0		0		5.000.000		5.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	21	0	21	0	23	5.000.000	23	5.000.000	25	10.000.000		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				0		0		0		5.000.000		5.000.000		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	1	0	1	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				726.885.000		748.443.000		775.927.000		814.799.000		839.674.000		

Meningkatnya tata kelola museum	Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke museum (%)	5	2	726.885.000	2	748.443.000	2	775.927.000	2,2	814.799.000	2,5	839.674.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				726.885.000		748.443.000		775.927.000		814.799.000		839.674.000		
Jumlah Museum yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	2	726.885.000	2	748.443.000	2	775.927.000	2	814.799.000	2	839.674.000		
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1	2		2		2		2		2			
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				200.000.000		200.000.000		200.000.000		215.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	215.000.000	2	225.000.000		
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				350.000.000		350.000.000		352.000.000		370.000.000		380.000.000		
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1	2	350.000.000	2	350.000.000	2	352.000.000	2	370.000.000	2	380.000.000		
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				176.885.000		198.443.000		223.927.000		229.799.000		234.674.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	2	176.885.000	2	198.443.000	2	223.927.000	2	229.799.000	2	234.674.000		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.536.201.000		1.581.761.000		1.639.845.000		1.721.997.000		1.774.567.000		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				625.887.000		644.449.000		668.114.000		701.585.000		723.003.000		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan) (%)	50	55	625.887.000	60	644.449.000	65	668.114.000	70	701.585.000	75	723.003.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA	

													N DAN OLAH RAGA	
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		39.000.000		
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	39.000.000		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		29.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	30.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	29.000.000		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		
Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	0	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	2	2		2		2		2		2			

3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	2	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				480.887.000		484.449.000		503.114.000		534.585.000		539.003.000		
Jumlah kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	0	480.887.000	0	484.449.000	1	503.114.000	1	534.585.000	1	539.003.000		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				450.887.000		449.449.000		428.114.000		459.585.000		460.003.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	450.887.000	2	449.449.000	2	428.114.000	2	459.585.000	2	460.003.000		
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		39.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	30.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	39.000.000		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		30.000.000		32.000.000		35.000.000		
Jumlah Dokumen Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	0	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	32.000.000	30	35.000.000		
3.26.02.2.04.0011 - Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota				25.000.000		25.000.000		30.000.000		32.000.000		35.000.000		
Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	0	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	32.000.000	30	35.000.000		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				257.252.000		264.882.000		274.609.000		288.366.000		297.169.000		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Nilai survey perspektif masyarakat terhadap pariwisata gresik (Nilai)	0	72	257.252.000	74	264.882.000	76	274.609.000	78	288.366.000	80	297.169.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				257.252.000		264.882.000		274.609.000		288.366.000		297.169.000		
Jumlah Promosi Pariwisata dan Jumlah Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	2	257.252.000	2	264.882.000	2	274.609.000	2	288.366.000	2	297.169.000		

	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				75.000.000		77.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	77.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				120.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				62.252.000		62.882.000		64.609.000		68.366.000		67.169.000		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	2	62.252.000	2	62.882.000	2	64.609.000	2	68.366.000	2	67.169.000		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1	1	20.000.000	1,4	30.000.000	1,8	30.000.000	2,2	30.000.000	2,5	30.000.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

Persentase sarana prasarana Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Jumlah Kekayaan Intelektual yang di daftarkan	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	0	20.000.000	0	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	1		2		1		1		1			
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan				0		0		0		0		0		
Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual				20.000.000		30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	1	20.000.000	2	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				633.062.000		642.430.000		667.122.000		702.046.000		724.395.000		
Meningkatnya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	46,79	6,76	633.062.000	7,59	642.430.000	7,84	667.122.000	9,09	702.046.000	9,33	724.395.000	3.26.2.22.2.19 .02.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAA N KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				383.062.000		542.430.000		487.122.000		532.046.000		474.395.000		
Jumlah kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	30	18	383.062.000	18	542.430.000	18	487.122.000	18	532.046.000	18	474.395.000		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	75	100		100		100		100		100			
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				333.062.000		342.430.000		287.122.000		332.046.000		274.395.000		

Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	75	100	333.062.000	100	342.430.000	100	287.122.000	100	332.046.000	100	274.395.000		
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	30	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				250.000.000		100.000.000		180.000.000		170.000.000		250.000.000		
Jumlah sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	2	250.000.000	2	100.000.000	3	180.000.000	3	170.000.000	3	250.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	30	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	0	1		0		0		1		1			
	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	0	25		0		25		0		25			
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				80.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		90.000.000		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	30	40	80.000.000	40	70.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	90.000.000		
3.26.05.2.02.0002 - Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				70.000.000		0		0		60.000.000		60.000.000		
Terlaksanya Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	0	1	70.000.000	0	0	0	0	1	60.000.000	1	60.000.000		
3.26.05.2.02.0004 - Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif				80.000.000		0		70.000.000		0		70.000.000		
Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal (Lembaga)	0	25	80.000.000	0	0	25	70.000.000	0	0	25	70.000.000		

3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	2	20.000.000	2	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

Dari Tabel diatas berisi rumusan proram, kegiatan dan sub kegiatan dan kerangka pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik selama periode tahun 2025-2029. Selanjutnya program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, yang menjadi pedoman penyusunan renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Tahun 2030-2034. Penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2030 meliputi RPJMD, Renstra dan Renja PD merupakan tanggung jawab Kepala Daerah terpilih selanjutnya.

4.3.Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Daerah

Rumusan Sub Kegiatan Prioritas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR						OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1	Gresik Seger	Gresik Sporti (Program santunan dalam upaya bentuk dukungan pada olahraga, atlet dan pelatih hingga e-sport)	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	>35	47.5	52,12	53,33	53,33	53,33	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader bupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	0	6	8	8	8	8
2			Persentase cabor berprestasi	84.21	84.30	84.5	84.7	84.75	85	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	0	60	75	90	100	110
3		Gresik Santri (Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya)	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2	6.25	6.25	8.3	8.3	10	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya	1	1	1	1	1	1
4	Gresik Mapan	Pembangunan Pasar Modern Tematik (Membangun pasar tematik modern yang terintegrasi dengan pariwisata)	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	46.79	6.76	7.59	7.84	9.09	9.33	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0	1	0	0	1	1

5		Gresik Ramah Keluarga (Membangun taman tematik ramah keluarga yang terintegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro)	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	46.79	6.76	7.59	7.84	9.09	9.33	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75	100	100	100	100	100
6	Gema Karya	Gresik Hub (KoesMilas Peningkatan Skill Anak Muda dalam Bentuk Workshop Bisnis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kesenian Tradisi dan Modern)	Rasio Wirausaha Pemuda	0,5	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader bupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	0	1	1	1	1	1
7			Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	46.79	6.76	7.59	7.84	9.09	9.33	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30	40	40	40	40	40
8	Gresik Barokah	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	>35	47.5	52,12	53,33	53,33	53,33	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	0	30	30	30	30	30
9	Pesona Gresik	Pengembangan dan Revitalisasi Ekowisata, yang Mengedepankan Keunggulan Kompetitif tiap Desa maupun	Persentase destinasi wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan)	-	55	60	65	70	75	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2

		Wilayah																	
10		Revitalisasi Fasilitas Kota seperti Area Pedestrian, Jalan Utama, Terminal, AlunAlun, serta Fasilitas Publik Lainnya yang Mendukung Aktivitas Wisatawan dan Pentas Seni Pertunjukan	Persentase destinasi wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan)	-	55	60	65	70	75	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2

4.4.Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Rumusan Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital											
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	75.000.000	1	77.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	62.252.000	2	62.882.000	2	64.609.000	2	68.366.000	2	67.169.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2											
Kegiatan Prioritas Utama : Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya											
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	333.062.000	100	342.430.000	100	287.122.000	100	332.046.000	100	274.395.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 4											

Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga											
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	5	3.950.000.000	5	4.000.000.000	5	4.100.000.000	5	4.300.000.000	5	4.500.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	130.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	6	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1	43.541.000	1	43.433.000	1	56.044.000	1	73.881.000	1	75.295.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	5	70.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04.2.01.05 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1.507.688.000	1	1.552.402.000	1	1.609.409.000	1	1.690.035.000	1	1.741.630.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 8											
Kegiatan Prioritas Utama : Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa											

2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	5	20.000.000	5	23.000.000	5	23.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	10	44.149.000	10	45.275.000	10	45.537.000	10	45.978.000	10	45.740.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 8											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan											
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	350.000.000	2	350.000.000	3	370.000.000	4	380.000.000	5	390.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40	320.000.000	40	320.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000	50	340.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

4.5.Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Rumusan Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.5

Tabel 4.5. Sub Kegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis :											
Proyek Prioritas : Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital											
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	75.000.000	1	77.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	62.252.000	2	62.882.000	2	64.609.000	2	68.366.000	2	67.169.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Strategis : Ekonomi Digital											
Proyek Prioritas : Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM											
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	333.062.000	100	342.430.000	100	287.122.000	100	332.046.000	100	274.395.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Strategis : Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)											
Proyek Prioritas : Pengembangan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga											
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	5	3.950.000.000	5	4.000.000.000	5	4.100.000.000	5	4.300.000.000	5	4.500.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	130.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi

organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota											Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	6	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1	43.541.000	1	43.433.000	1	56.044.000	1	73.881.000	1	75.295.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	5	70.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1.507.688.000	1	1.552.402.000	1	1.609.409.000	1	1.690.035.000	1	1.741.630.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Strategis : Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan karakter Bangsa											
Proyek Prioritas : Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di Kawasan Pemajuan Kebudayaan											
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	5	20.000.000	5	23.000.000	5	23.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	10	44.149.000	10	45.275.000	10	45.537.000	10	45.978.000	10	45.740.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Strategis : Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan karakter Bangsa											
Proyek Prioritas : Penguatan Etika Sosial Budaya untuk Membentuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun, dan Berkeadaban											
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	350.000.000	2	350.000.000	3	370.000.000	4	380.000.000	5	390.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40	320.000.000	40	320.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000	50	340.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
--	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	---

4.6.Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rumusan Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.6.

Tabel 4.6

Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	target	anggaran	
Asta cita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas: Meningkatnya daya saing kepemudaan											
2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	130.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga											
2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah	0	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	0	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	4	175.250.000	4	215.579.000	4	249.464.000	4	263.126.000	4	255.822.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan											
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	350.000.000	2	350.000.000	3	370.000.000	4	380.000.00	5	390.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40	320.000.000	40	320.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000	50	340.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
Outcome Prioritas: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan											
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	350.000.000	2	350.000.000	3	370.000.000	4	380.000.00	5	390.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40	320.000.000	40	320.000.000	45	330.000.000	45	330.000.000	50	340.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas: Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan											
2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	10	44.149.000	10	45.275.000	10	45.537.000	10	45.978.000	10	45.740.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan

											Olahraga
2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	1	0	1	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
Outcome Prioritas: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan											
2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	10	44.149.000	10	45.275.000	10	45.537.000	10	45.978.000	10	45.740.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	1	0	1	0	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata											
3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Pariwisata Kabupaten/Kota											Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Asta cita : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas: Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata											
3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02.0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02.0016 Penyusunan Dokumen	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

strategis bidang ekonomi kreatif daerah											Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02.0022 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	1	20.000.000	2	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

4.7.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Rumusan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030 dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga	%	42,98%	43%	43%	43%	44%	44%	45%	
2.	Perlindungan Sosial Inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan	%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	12%	
3.	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	%	4%	4%	6.25%	6.25%	8.3%	8.3%	10%	
4.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	%	5%	7%	2%	2%	2%	2.2%	2.5%	
5.	Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	4%	

4.8.Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

Rumusan Target Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030 dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

**Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025 – 2030**

NO .	Indikator Kinerja Kunci	Satua n	Targe t Awal tahun 2025	TARGET TAHUN						Kondis i Akhir
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas (%)	Persen (%)	10	10	10	10	11	11	12	12
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)	Persen (%)	4	4	6.25	6.25	8.3	8.3	10	10



BAB V PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan menelaah permasalahan-permasalahan pembangunan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Gresik dan langkah-langkah strategis untuk pemecahan masalah.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, sertasebagaitolokukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gresik.

Akhir kata semoga Rencana yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh perangkat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik, Aamiin.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Gresik



drg. SAIFUDIN GHOZALI
Pembina Utama Muda
NIP.19751123 200604 1 012